

**EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
Studi pada Alumni Diklat PIM TINGKAT III**

**TESIS**

**OLEH :**

**S U H E R M A N  
NPM : 111801089**



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 3**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCA SARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT  
KEPEMIMPINAN TINGKAT III PADA BADAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA  
UTARA Studi pada Alumni Diklat PIM TINGKAT III.**

**N a m a : SUHERMAN**

**N I M : 111801089**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Drs. H. Done Ali Usman, MAP**

**Pembimbing II**

**Drs. K a r i o n o, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : **“EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA Studi pada Alumni Diklat PIM TINGKAT III”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang ada pada penulis, baik dalam penulisan kata dan kalimat serta penganalisaan data. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pembaca untuk kebaikan dan kesempurnaan tesis ini.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik yang secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area;

3. Bapak Drs. H. Dcne Ali Usman, MAP sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan hingga penyelesaian tesis ini;
4. Bapak Drs. Kariono, MA, pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
5. Orang tuaku Alm. Ahmad Taman dan Hj. Maimunah, serta istriku tersayang/tercinta Suparmi yang penuh kesetiaan dan pengabdianya kepada suami dan sebagai pendorong studiku di Universitas Medan Area, juga anak-anakku tersayang, Aditya Abdullah, Adetamma Herman, Fitriana Hermi, Fourmita Hermi dan Suci Ramadhani Herman;
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga amal sholeh yang telah diberikan mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wata'ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 30 April 2013

Penulis

  
SUHERMAN

## **A B S T R A K**

### **EVALUASI PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

**N a m a** : **S U H E R M A N**  
**N I M** : **111801089**  
**Program** : **Magister Administrasi Publik**  
**Pembimbing I** : **Drs. H. Done Ali Usman, MAP**  
**Pembimbing II** : **Drs. Karyono, MA**

Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan syarat bagi para pejabat yang akan menduduki jabatan eselon III sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Badan Administrasi Negara Republik Indonesia yaitu seorang pejabat sebelum menduduki jabatan harus melalui proses pendidikan terlebih dahulu baru menduduki jabatan (dikduk), namun kenyataannya masih banyak ditemukan para pejabat eselon III yang telah menduduki eselon III tetapi belum mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (dukdik) artinya duduk terlebih dahulu baru mengikuti diklat. Hal ini merupakan penyimpangan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi para pejabat eselon III di lingkungan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Indonesia.

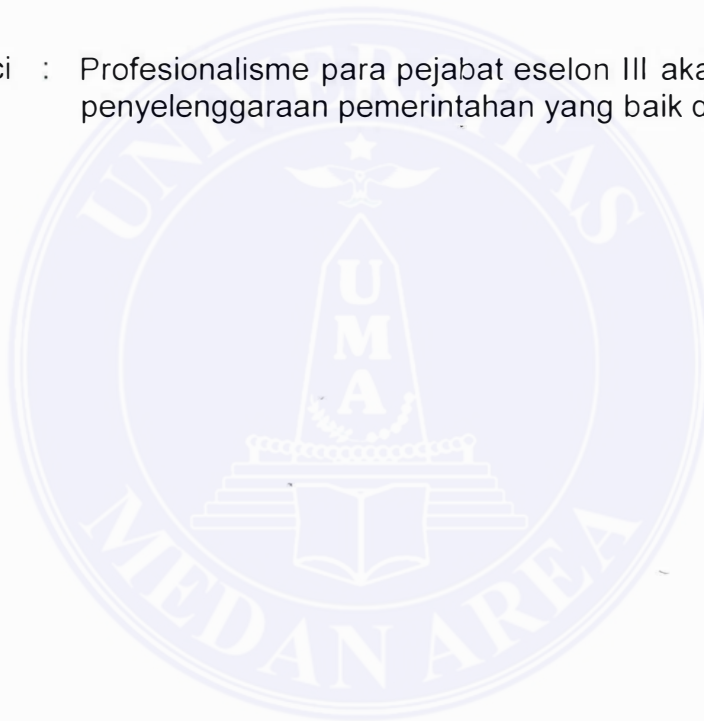
Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, maka dilakukan evaluasi penyelenggaraan diklat mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan setelah alumni diklat telah bertugas di institusi atau lembaga tempat mereka bertugas. Adapun evaluasi persiapan dilakukan mengenai identifikasi peserta, penyelenggara dan widyaiswara/tenaga pengajar serta dokumen dan sarana/prasarana pendukung penyelenggaraan diklat, selanjutnya evaluasi penyelenggaraan diklat dimulai dari evaluasi widyaiswara/tenaga pengajar, penyelenggara dan peserta diklat yang dilakukan dalam bentuk form-form yang baku sesuai dengan ISO dilanjutkan dengan laporan penyelenggaraan diklat dengan melakukan penetapan ranking peserta diklat mulai dari peringkat pertama sampai dengan peringkat akhir.

Setelah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III ini dapat diketahui sejauhmana tingkat

keberhasilan penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Diklat.

Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan atau profesionalisme para pejabat eselon III sangat dituntut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan profesionalitas para pejabat eselon III diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara khususnya dan Pemerintah Republik Indonesia umumnya.

Kata Kunci : Profesionalisme para pejabat eselon III akan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih



## DAFTAR ISI

		Halaman
Lembar Pengesahan .....		
Kata Pengantar .....		i
Abstrak .....		iii
Daftar Isi .....		v
Daftar Tabel .....		vi
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Perumusan Masalah .....	6
	1.3. Tujuan Penelitian .....	7
	1.4. Manfaat Hasil Penelitian .....	7
	1.5. Kerangka Pemikiran .....	8
	1.6. Hipotesis .....	15
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	16
	2.1. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan .....	17
	2.2. Kinerja Pegawai .....	19
	2.3. Evaluasi Kebijakan Publik .....	21
	2.4. Sumber Daya Manusia .....	22
	2.5. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia .....	23
	2.6. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia .....	24
	2.7. Proses Diklatpim Tingkat III .....	24
	2.8. Tujuan Diklat Kepemimpinan Tingkat III .....	25
	2.9. Evaluasi .....	26
BAB III	METODE PENELITIAN.	
	3.1. Jenis Penelitian .....	33
	3.2. Teknik Pengumpulan Data .....	33
	3.3. Lokasi Penelitian .....	33
	3.4. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel .....	34

	Halaman
3.5. Variabel Penelitian .....	34
3.6. Analisa Data .....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM DIKLAT PROVINSI SUMATERA UTARA.	
4.1. Kondisi Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara ....	37
4.2. Struktur Organasasi .....	39
4.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	40
4.4. Visi dan Misi .....	42
4.5. Program dan Penyelenggaraan Diklat .....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	
5.1. Hasil Penelitian .....	51
5.2. Peranan Pemimpin Dalam Penyelenggaraan Diklat .....	61
5.3. Peranan Sumber Daya Aparatur Dalam Penye lenggaraan Diklat .....	62
5.4. Peranan Widyaiswara Dalam Penyelenggaraan Diklat .....	65
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	
6.1. Kesimpulan .....	68
6.2. Saran-saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN	



**DAFTAR TABEL**

	Halaman
TABEL 4.1 Pangkat/Golongan Pegawai .....	44
TABEL 4.2. Latar Belakang Pendidikan Pegawai .....	45
TABEL 4.3. Jenis Kelamin Pegawai.....	45
TABEL 4.4. Pangkat/Golongan Widyaiswara .....	45
TABEL 4.5. Pendidikan Widyaiswara .....	45
TABEL 4.6. Jenis Kelamin Widyaiswara .....	45
TABEL 4.7. Sarana dan Prasarana Pendukung Diklat .....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan dan latihan bertujuan untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pengetahuan, keahlian, keterampilan, kreativitas dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih perlu didukung pimpinan yang mempunyai komitmen dan berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk memperoleh pemimpin yang berkompeten perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para pemimpin.

Pendidikan dan pelatihan bagi pemimpin suatu unit organisasi pemerintah adalah Diklat Pemimpinan Tingkat IV, Tingkat III, Tingkat II dan Tingkat I. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diperuntukkan bagi pejabat

eselon IV maupun para Pegawai Negeri Sipil (staf) yang mempunyai Pangkat/Golongan Minimal Penata Muda (III/a), sedangkan untuk Diklatpim Tingkat III diperuntukkan bagi para pejabat eselon IV maupun eselon III dengan Pangkat/Golongan Minimal (III/c), Diklatpim Tingkat II diperuntukkan bagi pejabat eselon III dan eselon II dengan Pangkat/Golongan Minimal Penata Tingkat I (III/d), sedangkan Diklatpim Tingkat I diperuntukkan bagi para pejabat eselon II maupun eselon I dengan Pangkat/Golongan minimal Pembina Tingkat I (IV/a). Diklatpim Tingkat I dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk pemberdayaan sumber daya manusia para pejabat eselon III dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah pejabat eselon III yang mengikuti diklat yang kadang dipandang kurang penting kontribusinya di bandingkan dengan kualitas. Karena kuantitas tanpa disertai kualitas hanya akan menjadi beban dalam pembiayaan. Sedangkan kualitas menyangkut mutu yang dapat berupa kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik seorang pejabat eselon III.

Oleh karena itu untuk keperluan akselerasi transformasi birokrasi diperlukan peningkatan kualitas pejabat eselon III baik dari aspek fisik maupun aspek non fisik. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat dilakukan melalui program-program kesehatan dan gizi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas non fisik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku – Buku

- Al Rasyid, Harun, Teguh Kismantoradji, 1994, *Statistik Sosial*, Pasca Sarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Done Ali Usman, H. Drs. MAP, Sumber Daya Manusia, Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara, Medan, 2009
- Hadi, Soetrisno, 2000, *Metodologi Research*, Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Kerlinger, Fred dan Elzar J Pedjahur, Taufik, 1987, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Nur Cahaya, Jakarta.
- Lubis, Zulkarnain, 1998, *Statistika dan Penerapannya Untuk Ilmu Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial*, Ian Press, Medan.
- Moenir, H.A.S. 1995, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, M.N, 2001, *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nazir, Moh, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1997, *Budaya Organisasi* Rhineke Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rhineka cipta, Jakarta.
- , 2001, *Ilmu Pemerintahan Jilid I, II, III, IV, V*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, Jakarta.
- Rasyid, M. Rayaas, 2000. *Makna Pemerintahan*, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Rukmana, Nana D.W. 2006, *Strategic Partnering For Educational Management*, Alfabeta, Semarang.
- Singarimbun, Masri dan Syofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi* (kaidah perilaku), PPM Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Supranto, J. 1993, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Pangsa Pasar* Reka Cipta, Jakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2000, *Manajemen Jasa*, Andi, Yogyakarta.
- Widjaja, Haw, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta.

### **B. Majalah/Artikel/Jurnal**

- Pamudji, S, 1994, *Profesionalisme Aparatur Negara Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah*, Widayapraja Nomor 16 Tahun III, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 1995 tentang *Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum*

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25M.PAN/2/2004 tentang *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang *Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan